

Identifikasi Potensi Kelembagaan Pertanian dan Kelembagaan Keuangan di Kabupaten Sukabumi

Eliesa Zahra Septiani

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email Korespondensi : eliesazhra@ummi.ac.id

ABSTRACT

Identification of institutional potential is the first step to determine the condition and activities of institutions in Sukabumi District, especially in Region 7, namely Tegalbuleud, Cidadap, Cidolog, Sagaranten, Curugkembar, and Pabuaran. The method used in this research is descriptive method. The data obtained is secondary data. The purpose of this research is to identify the potential of institutions in Sukabumi district. The result of this research is that in Sukabumi district there are two types of institutions, namely agricultural institutions and financial institutions. These types of institutions have an active status. So, based on the identification results, it can be concluded that activity and strengthening are factors that need to be developed. Because institutions can be one of the potential instruments that play a role in the process of regional development in Sukabumi District.

Keywords: Agricultural Institutions, Financial Institutions, Regional Potential, Cooperatives, Farmer Group

ABSTRAK

Identifikasi potensi kelembagaan pertanian dan keuangan merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan dan aktivitas kelembagaan-kelembagaan tersebut di Kabupaten Sukabumi. Khususnya di wilayah 7 yaitu Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curugkembar, dan Kecamatan Pabuaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian gabungan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder, data yang didapatkan yaitu melalui jurnal, buku, dan data-data dari website lembaga terkait. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi potensi kelembagaan di Kabupaten Sukabumi. Hasil dari penelitian ini yaitu di Kabupaten Sukabumi memiliki dua jenis kelembagaan, yaitu kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan. Jenis kelembagaan yang ada didalamnya memiliki status yang aktif. Maka, berdasarkan hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa aktivitas serta penguatan menjadi faktor yang perlu ditumbuhkembangkan. Kelembagaan dapat menjadi salah satu instrumen potensial yang berperan pada proses pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Kata kunci: Kelembagaan, Kelembagaan Pertanian, Kelembagaan Keuangan, Potensi Wilayah, Koperasi, Kelompok Tani

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, setiap daerah dituntut untuk mampu bersaing oleh iklim global baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini menyebabkan setiap daerah mempercepat laju pengembangan wilayahnya masing-masing. Pengembangan wilayah memiliki peranan penting untuk kemajuan daerah itu sendiri. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda maka, dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru. Perlu adanya identifikasi kondisi wilayah, potensi wilayah serta permasalahan wilayah yang kelak bisa menjadi kendala dalam proses pengembangan wilayah. Tak dapat dipungkiri, pembangunan tak lepas dari campur tangan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Indonesia. Penetapan peraturan terkait masing-masing sektor untuk meminimalisir adanya permasalahan serta menumbuhkembangkan sistem yang ada guna mempercepat laju pengembangan serta kemajuan suatu sektor tersebut.

Sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, identifikasi potensi wilayah menjadi hal yang sudah seharusnya dilaksanakan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia. Pengembangan suatu wilayah perlu adanya perencanaan yang benar-benar matang dan terstruktur. Salah satu caranya yaitu dengan dilakukannya identifikasi potensi wilayah yang bertujuan agar kelak dapat meningkatkan daya saing suatu daerah untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Termasuk mengidentifikasi potensi kelembagaan sebagai salah satu instrumen yang memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan wilayah. Kelembagaan dapat menjadi jembatan antara sistem dan aspek pelaksana agar sebuah tujuan dapat terlaksana dengan baik.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga atau instansi yang memiliki regulasi untuk suatu sektor tertentu. Kelembagaan merupakan wadah yang didalamnya terkandung berbagai sistem, tindakan, dan peraturan untuk kebutuhan kehidupan bermasyarakat pada suatu wilayah. Menurut (Sumaryanto & Rustandi, 2017) kelembagaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu kelembagaan sosial nonbisnis dan kelembagaan bisnis penunjang. Kelembagaan sosial nonbisnis yaitu lembaga yang tidak berkaitan dengan keuangan, adalah lembaga pertanian. Lembaga pertanian dengan semua lembaga yang terkandung didalamnya merupakan lembaga yang berperan sebagai pendukung dan penyedia segala kebutuhan untuk memajukan sektor pertanian. Meng-*support* segala sesuatu yang dibutuhkan baik ilmu, maupun input. Seperti, bantuan pupuk dan alat bertani, penyampaian ilmu pertanian, informasi cara penggunaan teknologi, dan pengerahan keikutsertaan masyarakat seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga penelitian, kegiatan penyuluhan (BPP) dll. Kelembagaan bisnis penunjang dan lembaga-lembaga yang terkandung didalamnya, merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba. Kelembagaan bisnis penunjang berkaitan dengan lembaga lembaga keuangan contohnya seperti, usaha pribadi, koperasi, bank, dan jasa keuangan lainnya.

Pengertian tentang kelembagaan yaitu sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat) (Sumaryanto & Rustandi, 2017). Maka dari itu, kelembagaan memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota lembaga maupun masyarakat, dan berhak untuk menurunkan sanksi bila ada peraturan kelembagaan yang tidak ditaati. Berkembangnya kelembagaan pada suatu daerah merupakan wadah untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan sebagai wadah untuk pemberdayaan sumberdaya manusia di suatu daerah. Karena kelembagaan merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan di suatu daerah, keberhasilan pembangunan daerah akan berhasil jika melibatkan kelembagaan. Kelembagaan dapat berkaitan dengan sesuatu yang permanen, karena secara rasional disadari bahwa keberadaan kelembagaan dibutuhkan dalam kehidupan.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah tingkat II yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah berupa daratan seluas 4.145 km² dan memiliki 47 kecamatan. Salah satunya yaitu wilayah 7 yang mana merupakan kecamatan Tegalbuleud, Cidolog, Sagaranten, Cidadap, Curug Kembar, dan Pabuaran. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah pertanian yang luas. Perlu adanya penguatan kelembagaan sebagai salah satu instrumen potensial dalam proses pengembangan wilayah. Oleh sebab itu perlu adanya identifikasi pada keadaan dan aktivitas kelembagaan di Kabupaten Sukabumi. Khususnya di wilayah 7 yaitu Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curugkembar, dan Kecamatan Pabuaran.

Diantara deretan kelembagaan, yang menarik untuk dibahas adalah kelembagaan pertanian dan keuangan. Karena keduanya kerap memiliki keterkaitan, antara sektor pertanian dan sektor perekonomian. Tentang cara berjalannya sistem kelembagaan dalam berpengaruh terhadap kemajuan sektor pertanian, dan kelembagaan juga mempengaruhi berjalannya sistem kelembagaan pertanian terkait alokasi dana, permodalan usaha tani dll.

Berangkat dari orientasi pembangunan pertanian di Indonesia, yang berdasar pada kelembagaan pertanian dan bersistem agribisnis maka peran kelembagaan pertanian termasuk instansi atau lembaga lain didalamnya, menjadi faktor penting dalam berhasilnya pengembangan sektor pertanian. Tak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian saat ini, dibangun oleh kelembagaan pertanian yang dimulai dengan skala kecil. Kelembagaan pertanian merupakan salah satu sub sektor yang bisa dipertimbangkan untuk diidentifikasi potensinya guna pengembangan suatu wilayah pertanian. Kelembagaan pertanian juga menjadi aspek yang potensial karena kelembagaan pertanian memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam proses pengembangan atau pembangunan wilayah pertanian. Kelembagaan pertanian berperan sebagai regulasi dalam menjalankan segala aktifitas pada sektor pertanian seperti, penyuluhan, pengembangan teknologi pertanian, pembiayaan, pemasaran hasil usahatani, permodalan petani, dan lain sebagainya. Contoh dari kelembagaan pertanian yaitu, kelompok tani, BPP, instansi pertanian dll.

Kelembagaan keuangan adalah kelembagaan yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai instansi yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan modal serta bertujuan untuk mencari keuntungan. Kelembagaan keuangan yang dapat sering dijumpai yaitu mencakup lembaga-lembaga seperti bank, koperasi, dan otoritas pengatur keuangan lainnya. Kelembagaan keuangan berinteraksi sebagai fasilitator dana, alokasi permodalan, sebagai penggerak pengembangan ekonomi di suatu daerah. Kelembagaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian, karena sebagai tempat para pedagang, petani dll., menyimpan dana atau bahkan mengambil kredit untuk alokasi modal usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang menyajikan data berikut hasil dari keadaan dan aktivitas kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan di Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu, adanya penelitian ini menjadi pembaruan dalam penyajian data kondisi kelembagaan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini sebagai langkah awal untuk kemudian bisa mendapatkan tindaklanjut kepada pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Sukabumi.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi memiliki kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan. Kelembagaan masyarakat yang ada pada kelembagaan pertanian di Kabupaten Sukabumi yaitu Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani. Adapun Kelembagaan Pemerintah yang ada di kelembagaan pertanian contohnya adalah BPP.

Pada data BPS Kabupaten Sukabumi, kelembagaan keuangan hanya ada koperasi dan bank yang terbagi menjadi dua, yaitu swasta dan milik pemerintah. Salah satu faktor pendukung dalam proses pengembangan wilayah adalah mengetahui keadaan dan aktivitas kelembagaan yang ada di suatu daerah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan dan status kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi yang akan disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif. Adapun daerah yang menjadi tempat penelitian yaitu Kabupaten Sukabumi wilayah 7 yang terdiri dari Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Kecamatan Curugkembar, dan Kecamatan Pabuaran yang data-datanya diperoleh melalui data BPS Kabupaten Sukabumi. Metode analisis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif melalui rekapitulasi data yang kemudian dideskripsikan. Variabel tunggal pada penelitian ini yaitu potensi kelembagaan. Pada penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling secara khusus. Karena data yang telah dikumpulkan diperoleh melalui data sekunder yaitu data BPS Kabupaten Sukabumi, buku, website lembaga dan jurnal ilmiah. Rancangan analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan merupakan keseluruhan dari pola-pola ideal, organisasi dan aktivitas yang berpusat pada kebutuhan dasar. Tujuan suatu lembaga dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga lembaga tersebut memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga juga merupakan sesuatu konsep yang bersatu dengan struktural, maknanya lembaga bukan hanya sesuatu wadah yang didalamnya memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam pola aktivitas sosial, tetapi juga terdapat pola organisasi untuk menjalankan lembaga tersebut (Alfianor et al., 2020). Kelembagaan Kabupaten Sukabumi terkhusus wilayah 7 yang terdiri dari kecamatan Tegalbuleud, Cidadap, Cidolog, Sagaranten, Curugkembar dan Pabuaran. Memiliki kondisi wilayah yang hampir sama. Kabupaten Sukabumi terletak antara 6 57' -7 25' Lintang Selatan dan 106 49' -107 Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Sukabumi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Kondisi wilayah Kecamatan Tegalbuleud terletak pada ketinggian 0 m – 400 m di atas permukaan laut. Dari segi tata letak wilayah Kecamatan Tegalbuleud berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cidolog, Kecamatan Sagaranten
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Kecamatan Cibitung

Kecamatan Tegalbuleud terletak di daerah dataran rendah pinggir pantai dan lereng/punggung bukit. Wilayah Kecamatan Tegalbuleud terletak 104 kilometer dari Ibukota Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Tegalbuleud memiliki kepadatan paling rendah di Kabupaten Sukabumi yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 145 jiwa. Kecamatan Cidolog terletak pada ketinggian 300-400 m diatas permukaan laut. Dari segi tata letak Kecamatan Cidolog berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sagaranten
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalbuleud
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Kecamatan Tegalbuleud

Sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Cidolog berada di daerah dataran lereng/punggung bukit.

Kecamatan Sagaranten memiliki posisi wilayah yang terletak pada ketinggian 300-500 di atas permukaan laut. Dari segi tata letak wilayah Kecamatan Sagaranten berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pabuaran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cidadap
- Sebelah Timur : Kecamatan Curugkembar
- Sebelah Barat : Kecamatan Cidolog

Sebagian besar wilayah dari Kecamatan Sagaranten di daerah dataran dan lereng/punggung bukit.

Secara geografis Kecamatan Cidadap memiliki luas wilayah 75,70 km². Menurut data BPS, Wilayah Kecamatan Cidadap berada 116 km dari ibukota Kabupaten Sukabumi. Sebaian besar wilayah Kecamatan Cidadap adalah lahan pertanian dengan luas total 45,33 km². Kecamatan Cidadap dari segi tata letaknya berbatasan dengan:

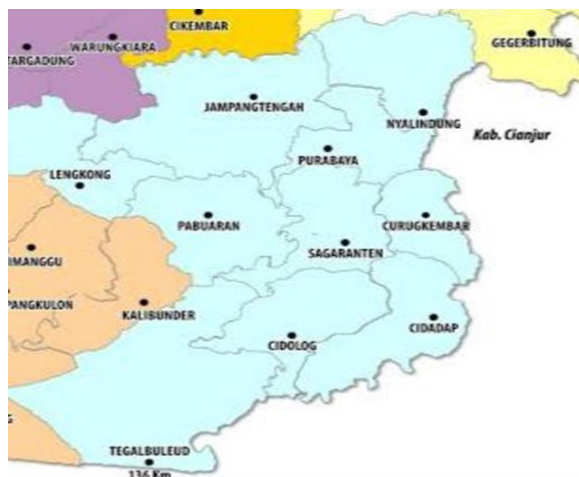
- Sebelah Utara : Kota Sukabumi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purabaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Jampangtengah

Posisi Kecamatan Curugkembar secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 54,57 km². Curugkembar memiliki batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Purabaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cidadap 19
- Sebelah Timur : Kecamatan Sagaranten
- Sebelah Barat : Kecamatan Cianjur

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi berada pada ketinggian 300-500 mdpl. Dari segi tata letak Kecamatan Pabuaran berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Jampang Tenga
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalbuleud
- Sebelah Barat : Kecamatan Sagaranten
- Sebelah Timur : Kecamatan Kalibunder, Lengkong



Gambar 1. Peta wilayah 7 Kabupaten Sukabumi
 (Sumber: pa-cibadak.go.id)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, Wilayah 7 Kabupaten Sukabumi jika dikelompokkan memiliki dua kelompok jenis kelembagaan yaitu kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah pertanian yang luas, maka dari itu kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan ini memiliki keterkaitan. Kelembagaan pertanian yang ada berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi segala kebutuhan petani. Sedangkan kelembagaan keuangan salah satu fungsinya adalah sebagai penyedia layanan permodalan untuk petani menjalankan usahatani.

Kelembagaan Pertanian

Berdasarkan orientasi pembangunan Indonesia pada saat ini, kelembagaan pertanian termasuk kelembagaan petani berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan (Sihombing, 2023). Kelembagaan pertanian dapat berfungsi sebagai perantara yang memudahkan para pemangku jabatan dalam memfasilitasi segala kebutuhan para petani dalam berusaha tani. Melalui kelembagaan yang sudah terbentuk saat ini, diharapkan petani mampu meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kemandiriannya, serta menguasai teknologi usaha tani seperti pembuatan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, dan peningkatan kemitraan antara industri dengan petani. (Sihombing, 2023). Kelembagaan pertanian merupakan instrumen penting dan menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan wilayah sektor pertanian. Penguatan kelembagaan pertanian dapat memperkuat sistem pertanian yang ada di wilayah tertentu. Kelembagaan pertanian terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan BPP. Salah satu kelembagaan yang dikembangkan dalam meningkatkan hasil pertanian adalah kelompok tani (Sadapotto et al., 2020) Dibentuknya kelompok tani adalah untuk mempermudah pengelolaan usahatani secara bersamaan daripada perorangan. Kelompok tani dikategorikan kembali menurut kelas kemampuannya. Diantaranya kelas pemula, lanjut, madya, dan utama. Seperti data pada tabel dibawah ini.

Tabel.1 Rekapitulasi data jumlah poktan menurut kelasnya

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Poktan (Pemula)	Jumlah Poktan (Lanjut)	Jumlah Poktan (Madya)	Jumlah Poktan (Utama)
1	TEGAL	8	234	158	66	10	0
2	CIDADAP	6	61	44	13	4	0
3	CIDOLOG	5	80	51	23	6	0
4	CURUGKEMB	7	71	22	28	20	1
5	PABUARAN	7	94	29	54	11	0
6	SAGARANTEN	12	101	39	42	20	0

(Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi)

Berdasarkan tabel rekapitulasi data diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Tegalbuleud memiliki jumlah kelompok tani yang paling banyak diantara kecamatan lain di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi. Dengan jumlah kelas terbanyak yaitu kelas kelompok tani pemula, dan belum memiliki kelas utama. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani paling sedikit adalah Kecamatan Cidadap dengan jumlah kelas yang terbanyak adalah kelas pemula. Kelompok tani tersebut berstatus aktif. Kelompok kelompok tani tersebut tergabung mendi satu kelompok yang lebih besar lagi, yaitu Gabungan Kelompok Tani.

Gabungan Kelompok Tani atau biasa disingkat GAPOKTAN adalah wadah akomodasi bagi keperluan di setiap masing-masing kelompok tani. Selain itu, Gapoktan juga berfungsi sebagai media penting untuk berkomunikasi memberikan informasi antara kelompok tani satu dan yang lainnya mengenai ilmu pertanian maupun yang menyangkut kemajuan usahataninya. Dengan adanya Gapoktan ini menjadikan modal usaha sosial yang cukup besar yang berguna di tingkat petani dan membantu majunya pengoptimalan petani menjadi lebih produktif (Sindi, 2023)

Dibawah ini merupakan rekapitulasi data yang menunjukkan jumlah gapoktan yang ada di setiap kecamatan di wilayah 7.

Tabel.2 Rekapitulasi jumlah gapoktan setiap kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Gapoktan
1	Cidadap	6
2	Cidolo	5
3	Curugkembar	7
4	Pabuaran	7
5	Sagaranten	12
6	Tegal Buleud	8

(Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi)

Dari tabel rekapitulasi data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Cidadap memiliki 6 gapoktan, Kecamatan Cidolog memiliki 5 gapoktan, Kecamatan Curugkembar memiliki 7 gapoktan, kecamatan Pabuaran memiliki 7 gapoktan, Kecamatan Sagaranten memiliki 7 gapoktan, Kecamatan Tegalbuleud memiliki 8 Gapoktan. Gapoktan dapat menjadi penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian, unit usaha dan keuangan, unit usaha pemasaran dan unit penyedia informasi untuk kebutuhan poktan (kelompok tani) yang tergabung didalamnya.

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pertanian yang berfungsi sebagai wadah dalam proses pemberian informasi , ilmu, dan teknis penggunaan teknologi melalui kegiatan penyuluhan. BPP berada dibawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Berikut tabel yang menunjukkan ketersediaan BPP di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi.

Tabel.3 Rekapitulasi data jumlah BPP di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Jumlah BPP
1	Tegalbuleud	1
2	Cidadap	1
3	Cidolog	1
4	Curugkembar	1
5	Pabuaran	1
6	Sagaranten	1

(Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi)

Maka dari itu dalam setiap kecamatan terdapat 1 BPP sebagai unit penunjang penyuluhan. BPP di kecamatan Tegalbuleud, Cidadap, Cidolog, Curugkembar, Pabuaran dan Sagaranten berstatus aktif. Berikut data rekapitulasi data BPP yang ada di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data yang tersaji diatas, maka kelembagaan pertanian ada yang termasuk kedalam kelembagaan masyarakat dan ada yang termasuk kedalam kelembagaan pemerintah. Contoh dari kelembagaan masyarakat pertanian adalah, kelompok tani dan gapoktan. Sedangkan kelembagaan pemerintah yang termasuk kedalam kelembagaan pemerintah adalah BPP. Menurut data BPS Kabupaten Sukabumi, kelembagaan pertanian di Kabupaten Sukabumi sudah terbentuk disetiap kecamatan di wilayah 7. Maka dari itu, menunjukkan bahwa pertanian di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi memiliki kelembagaan pertanian yang aktif, oleh karena itu kegiatan pertanian di setiap kecamatan di wilayah 7 akan lebih terstruktur karena para pemilik usahatani sudah berkelompok. Yang mana hal itu akan memudahkan para petani untuk mendapatkan segala informasi, ilmu, bantuan, dan kebutuhan input usahatani.

Kelembagaan Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua bidang keuangan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dengan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya (Pulungan, Soulthan Saladin Batubara, Delyana Rahmawany, 2020) Kelembagaan keuangan biasanya menyediakan berbagai layanan yang bisa digunakan nasabah seperti kredit modal, simpan pinjam, dll.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, kelembagaan keuangan yang sering dijumpai di Kabupaten Sukabumi yaitu bank dan koperasi.

Koperasi merupakan wadah untuk melakukan usaha kemudian ditujukan untuk kesejahteraan bersama . Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam proses pembentukan usaha masyarakat. Koperasi di Kabupaten Sukabumi terkhusus di Wilayah 7 berstatus aktif. Sebagai salah satu kelembagaan yang mendorong kemajuan ekonomi di lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi data BPS dalam ketersediaan koperasi di Wilayah 7 Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2021

Tabel.4 Rekapitulasi data koperasi wilayah 7 Kabupaten Sukabumi 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	
		2020	2021
1	Tegalbuleud	35	35
2	Cidolog	22	22
3	Cidadap	10	11
4	Sagaranten	32	35
5	Curugkembar	–	–
6	Pabuaran	–	–

(Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi yang ada di kecamatan Cidadap dan Sagaranten, sedangkan kecamatan Curugkembar dan Pabuaran tidak adanya koperasi. Dari jumlah data diatas, terdapat jenis Koperasi yang berbeda-beda. Contohnya, Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pegawai Negeri, dan Koperasi Sekolah.

Bank merupakan salah satu kelembagaan keuangan yang ada di Wilayah 7 Kabupaten Sukabumi. Bank merupakan tempat penyimpanan dana baik oleh perusahaan, pelaku usaha individu, dll. Bank merupakan tempat pengelolaan uang. Bank bisa memberikan layanan kredit usaha untuk nasabahnya. Di Wilayah 7 Kabupaten Sukabumi tersebar bank dengan status yang berbeda. Bank BUMN dan bank swasta.

Berikut merupakan tabel rekapitulasi data bank yang ada di Wilayah 7 Kabupaten Sukabumi.

Tabel.5 Rekapitulasi data Bank di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi

No	Kecamatan	Jumlah Bank	
		2020	2021
1	Tegalbuleud	1	1
2	Cidolog	1	1
3	Cidadap	2	1
4	Sagaranten	4	4
5	Curugkembar	1	1
6	Pabuaran	2	1

(Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi)

Menurut hasil rekapitulasi data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap kecamatan memiliki bank. Kecamatan yang terbanyak dalam memiliki bank adalah kecamatan Sagaranten. Bank yang tersedia di kecamatan-kecamatan tersebut merupakan Bank Umum Pemerintah, Bank Swasta dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan data yang tersaji diatas, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi adalah semua kecamatan yang ada di wilayah 7 Kabupaten Sukabumi memiliki kelembagaan keuangan koperasi dan bank. Hal ini dapat dipertimbangan untuk kemudian menjadi potensi dalam proses pengembangan wilayah khususnya pengembangan wilayah pertanian di Kabupaten Sukabumi, karena kelembagaan keuangan memberikan dampak yang baik bagi perputaran ekonomi masyarakat. Contohnya dalam memberikan kredit modal untuk usahatani para petani.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan di Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi dua. Kelembagaan pertanian dan kelembagaan keuangan. Yang termasuk kedalam kelembagaan pertanian yaitu, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan BPP. Semua kelembagaan pertanian berstatus aktif dan berjalan. Yang termasuk kedalam kelembagaan keuangan di Kabupaten Sukabumi yaitu, koperasi, dan bank. Kelembagaan Pertanian dan Kelembagaan Keuangan merupakan dua jenis kelembagaan yang berkaitan. Kebutuhan permodalan yang menjadi kebutuhan petani untuk melaksanakan usahatannya, maka peran kelembagaan keuangan dapat menjadi penunjang. Yaitu memfasilitasi alokasi dana untuk permodalan usahatani dengan jenis fasilitas kredit usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kedua peneliti ucapkan terimakasih kepada orangtua karena atas dukungan doa, moril dan materil peneliti menjadi semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Ketiga peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing karena telah membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan penelitian ini. Terakhir, peneliti ucapkan terimakasih kepada lembaga-lembaga dan instansi yang terkait karena telah menyajikan data sehingga peneliti dapat mengakses data untuk penelitian ini dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianor, R., Annadia, N., & Hidayati, A. (2020). *Identifikasi Peran Kelembagaan Dalam Kegiatan Pariwisata Kabupaten Tabalong Identification of Institutional Roles in Tourism Activities Kabupaten*. 6(1), 11–18.
- Pulungan, Soulthan Saladin Batubara, Delyana Rahmawany, M. Y. (2020). *Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah*. 7597(1), 23–37.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sadapotto, A., Muhammadiyahenrekang, U., & Muhammadiyahrappang, U. (2020). *Universitas muhammadiyah enrekang*. 3.
- Sihombing, Y. (2023). *Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*. 5. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>

Sindi, S. (2023). *Kebijakan Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Produktivitas Program Kerja Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)*.

Sumaryanto, & Rustandi, Y. (2017). *AJAR, BUKU DAN, PENUMBUHAN PENGEMBANGAN I, KELEMBAGAAN PETANI*. 164.

BPS Kabupaten Sukabumi, 2021. *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2021*. Katalog: 1102001.3202.
ISSN : 0215-0448. Sukabumi.

BPS Kabupaten Sukabumi, 2020. *Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2020*. Katalog: 1102001 .3202.
ISSN : 0215-0448. Sukabumi.